

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arliman, L. (2017). JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG KEJAKSAAAN.
- Budiardjo, M. (2003). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia pustaka utama.
- Mappong, Zainuddin. (2022). *Penyelesaian Piutang BLBI melalui Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) ditinjau dari Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Maringka, J. S. (2022). Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional. Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Widiarty, W. S. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.

Jurnal

- Albatul, F. (2014). Kewenangan Jaksa dalam Memulihkan Kekayaan Negara. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 4(01), 45-70.
- Arifianto, M. (2022). Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara Ditinjau Dari Teori Sistem Hukum. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 1(1), 198-210.
- Hadi, S. (2023). *Aspek Hukum Penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dalam Bisnis Perbankan di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Publicum Vol. 4 No. 2 November 2023.

- Jannati, W., & Simangunsong, F. (2022). *Makna Kepentingan Umum didalam Deponering*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022.
- Nurhayani. Upaya Penyelesaian BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Lex Jurnalica Vol.4 No.1, Desember 2006.
- Prasetyo, T. (2010). Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia. Halaman
- Putra, A. K., Rani, F. A., & Syahbandir, M. (2017). Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh). Syiah Kuala Law Journal, 1(2), 163-182.
- Saputra, D., Perdana, A. S., & Murbawan, H. (2022). Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Halu Oleo Law Review, 6(2), 218-237.
- Sardari, A., A. & Shodiq, J. (2022). *Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum*. JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law Volume 1 No. 1. July-Desember 2022.
- Sibarani, K. B. (2023). *Politik Hukum Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*. CITRA JUSTICIA Volume 24, Number 01, February 2023 Page 73-84.
- Sugema, I., & Simorangkir, I. (2004). Peranan The Lender Of Last Resort (Lolr) Terhadap Perekonomian: Suatu Kajian Empiris Terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan , 7 (1), 53-88.

- Sugiharto, G., Amelia, A., Muliawan, C., & Nasarudin, T. M. (2021). Praktek Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung). *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(2), 46-62.
- Sutrisno, E. (2005). *BLBI dalam Perspektif Hukum (Cermin Buram Keterkaitan Hukum & Ekonomi)*. Syariah, 02/Sept/2005.
- Tinambunan, W. D., & Siwi, G. R. (2022). Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang Kejaksaan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 125-142.
- Yudhistira, N., & Indrawati, Y. (2023). *Hapusnya Hak Tagih Pemegang Obligasi Lama Terhadap Negara Ditinjau dari UU Perbendaharaan Indonesia / Indische Comptabiliteitswet (ICW)*. UNNES LAW REVIEW Vol. 6 No. 1, September 2023
- Yusuf, M., Sampurno, S., Hasrul, M. & Arisaputra, M., I. (2018). *Kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara*. *Jurnal YUSTIKA Media Hukum dan Keadilan Fakultas Hukum Universitas Surabaya* Vol. 21 No. 2, Desember 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara
oleh Panitia Urusan Piutang Negara

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak

Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan

Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak

Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan

Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan

Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha

Negara

Peraturan Kejaksaan Nomor : PER-025/A/JA/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan

Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha